

BAB VI

SARAN

Setelah melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Puri Indah maka saran yang diberikan meliputi:

1. Mahasiswa calon apoteker hendaklah lebih membekali diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan apotek, perundang-undangan farmasi, pelayanan kefarmasian dan apotek sehingga dapat diterapkan manajemen saat terjun di apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker hendaklah meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik kepada pasien serta tenaga kesehatan lain sehingga tercipta hubungan yang baik.
3. Mahasiswa calon apoteker hendaklah lebih aktif dan kreatif selama menjalani PKPA sehingga memiliki bekal dalam memasuki dunia kerja selanjutnya.
4. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengendalian untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep untuk itu di setiap tahapan pengerjaan resep petugas diharapkan membubuhkan paraf mulai dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket sampai pada penyerahan obat.
5. Calon apoteker perlu berlatih kemampuan untuk berkomunikasi agar kegiatan KIE dapat berlangsung dengan baik.
6. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan perlu disediakan kotak saran sebagai evaluasi mutu pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Seto, Nita, dan Triana, 2012, Manajemen Farmasi, Airlangga University Press, Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Menkes RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17th, American Pharmacist Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menkes RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menkes RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menkes RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- MIMS Indonesia, 2018. MIMS Petunjuk Konsultasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor No. 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor No. 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Ruchi Mathur, MD; Carolyn J. Alexander, MD; Jacqueline Yano, MA; Bradley Trivax, MD; Ricardo Azziz, MD, MPH, MBA. 2008, Use of Metformin in Polycystic ovary syndrome , *American Journal of obstetrics & Gynecology*, 596-609.

Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed., Pharmaceutical Press, London.

Velazquez, E.M., Mendoza, S., Hamer, T., Sosa, F. and Glueck, C.J. 1994 Metformin therapy in polycystic ovary syndrom reduces hyperinsulinemia, insulin resistance, hyperandrogenemia, and systolic blood pressure, while facilitating normal menses and pregnancy, *Metabolism* (43) : 647-654.